



ISSN 1979-1755

Pasai

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

Volume 7, Nomor 2, November 2013



Photographer: Zainal Abidin, Model: Sandra Dewi

Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Giral
Di Bank Indonesia

Andria Zulfa

Pendidikan, Masyarakat Dan Perubahan

Sulaiman Ismail

Pendidikan Politik Dalam Mencerdaskan Regenerasi
Muda Melalui Sekolah

Fakhrurrazi



Daftar Isi

No.	Judul Artikel	Halaman
1.	Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Giral Di Bank Indonesia. <i>Andria Zulfa</i>	301
2.	Pendidikan, Masyarakat Dan Perubahan. <i>Sulaiman Ismail</i>	317
3.	Pendidikan Politik Dalam Mencerdaskan Regenerasi Muda Melalui Sekolah. <i>Fakhrurrazi</i>	324
4.	The Factors in lerning second language. <i>Idaryani</i>	336
5.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Puskesmas Kota Jantho Aceh Besar. <i>Nur Faliza, Heriyana</i>	340
6.	Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Pendidikan Tinggi Islam Di Era Globalisasi. <i>Fuadi, Fakhrurrazi</i>	354
7.	Sistem Pemungutan, Administrasi dan Perilaku terhadap Peluang Korupsi Pajak, <i>Muhammad Arifai</i>	366
8.	Praktek Persekongkolan Tender Dalam Proses Penjualan Saham (Analisa Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Kasus Penjualan Saham PT. Indomobil International, Tbk). <i>Tri Widya Kurniasari, SH, M.Hum</i>	377
9.	Kajian Redenominasi Rupiah Dan Kesiapan Masyarakat. <i>Rita Meutia</i>	399
10.	Jalan Berliku Menuju Perdamaian Aceh. <i>Saifuddin</i>	409
11.	Sistem Perdagangan Kerajaan Samudera-Pasai. <i>Abdul Hadi Arifin</i>	420

12. Analisis Pengaruh Implementasi Brand Positioning Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Usaha Franchising Kentucky Fried Chicken (Kfc) Di Kota Lhokseumawe. *Siti Maimunah* 436
13. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Baitul Maal Di Kota Lhokseumawe). *Yul Bahri* 463
14. Pengaturan Kontrol Akses dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kota Lhokseumawe. *Yulius Dharma* 479
15. Pengaruh Laba Bersih, Potensi Pertumbuhan dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Yunina* 492
16. Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah Ditinjau Secara Kriminologis. *Yusnanik Bakhtiar* 506
17. Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Suatu System Dalam Pendidikan. *Zuraida, S.Ag.MA* 516
18. Dr. Burhanuddin Al-Helmi Dan Tuduhan Dalam Komplotan Anti Penubuhan Malaysia, 1963-1969. *Mohamad Muzammil Mohamad Noor* 524

JP-LPPM
V6, N2
V-V

Fal
Pe

Semakin ma
banyak pen
uang giral
dalam men
kalangan te
ia tidak ma
giral dapa
pembayaran
secara umu
mengendali
pendek ant
pelaksanaa
Minimum),
intervensi v

Kata kunci

Pendahulu

Peny
perekonom
terhadap j
daerah ma
dan sebalik
akan sema
transaksin
pembisnis
dan memp
dapat berj
dan perus
intermedie
pihak yan

¹ Do



Jalan Berliku Menuju Perdamaian Aceh

Saifuddin¹

Abstrak

Proses perdamaian di Aceh adalah satu proses yang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Proses perdamaian di Aceh telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasilnya. Proses panjang menuju perdamaian di Aceh bukan lagi sekedar menjadi catatan sejarah, tetapi sekaligus menjadi prestasi bagi bangsa Indonesia. Mengakhiri perang yang disebabkan oleh adanya kelompok yang sudah begitu lama mengangkat senjata bukanlah sesuatu yang mudah. Perdamaian Aceh pernah mengalami beberapa kali kegagalan di lapangan. Perundingan pertama dan lahirnya jeda kemanusiaan. Ketika jeda kemanusiaan tidak lagi dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berkonflik maka dirintislah perundingan kedua dan lahirnya COHA. Apabila COHA gagal dalam implimentasinya maka diggas perundingan ketiga dan lahirnya perjanjian damai Helsinki. Oleh karena itu wajar jika disebutkan perdamaian Aceh melalui jalan berliku. Namun Aceh kini bukan lagi tempat latihan perang bagi tentera Indonesia dan juga bukan arena konflik bersenjata di Nusantara melainkan sudah menjadi laboratorium yang mengajarkan arti demokrasi sebenarnya bagi Indonesia.

Kata Kunci: Konflik Dan Perdamaian

1. Pengenalan

Peperangan yang terjadi di negara-negara dunia pada amnya berawal dari adanya kepincangan antara sumber daya alam yang melimpah dan minimnya sumber daya manusia. Keadaan tersebut melahirkan kepincangan ekonomi, ketidakadilan dan kecemburuan sosial mendorong lahirnya pergolakan sosial dan pemberontakan bersenjata. Konflik bersenjata dan proses perdamaian di Aceh telah memberi pengajaran yang berarti kepada kita.

Perdamaian adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga ia harus diperjuangkan dan dipertahankan. Proses perdamaian di Aceh adalah suatu proses yang penuh dengan cabaran serta mengambil waktu yang lama untuk mencapai hasilnya.

¹Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Email: saifuddin_my@yahoo.com

Berbagai pendekatan telah diterapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid upaya dialog damai dengan nama Jeda Kemanusiaan I dan II telah dilakukan. Upaya ini dilanjutkan kembali oleh presiden Megawati Soekarnoputri namun pada akhirnya mengalami kegagalan, sehingga penyelesaian masalah Aceh tidak selesai masa itu.

Pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Aceh kembali digunakan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan cara melakukan pembicaraan informal dengan pihak GAM. Pembicaraan informal yang berlangsung sejak akhir Januari 2005 sampai dengan Mei 2005 dilakukan dengan bantuan lembaga internasional Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin mantan presiden Finlandia Marti Atisari.

Rangkaian pembicaraan yang berlangsung empat tahap antara delegasi pemerintah RI dan GAM akhirnya menghasilkan sebuah nota persefahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Nota persefahaman tersebut kemudian lebih dikenal dengan MoU Helsinki. MoU tersebut berisi kesepakatan dalam berbagai hal dan ia menjadi titik awal menuju alaf baru kehidupan di Aceh.

2. Dari Perang Ke Perundingan

Pelajaran penting yang dapat diambil dari konflik di Filipina Selatan ketika rezim Marcos adalah masalah yang dialami Filipina dapat dibawa dalam Konferensi Internasional. Contoh lain dari konflik pemisahan diri adalah konflik di Yugoslavia pada akhir tahun 1990-an yang ingin memisahkan diri dari negara induknya.

Dalam menyelesaikan hal ini Yugoslavia menerima banyak bantuan dari organisasi internasional seperti Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE). Perundingan berhasil ditempuh secara baik dan akhirnya CSCE dan PBB mengakui bahwa yang tersisa adalah negara Serbia dan Montenegro yang merupakan negara Yugoslavia yang baru. Tidak semua perundingan membuahkan hasil yang baik.

Indonesia telah mengalami banyak kegagalan dalam hal perundingan. Misalnya perundingan Indonesia dengan pihak separatis di Timor-Timur. Hasil yang diperoleh, Indonesia harus merelakan lepasnya Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia juga menggunakan segala cara untuk menyelesaikan persoalan dengan pihak pejuang kemerdekaan di Aceh, baik dengan cara kekerasan ataupun dengan cara diplomasi. Masalah Aceh merupakan masalah dalam negeri Indonesia, maka pada awalnya pemerintah Indonesia berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan masalah Aceh secara sendiri, tanpa melibatkan lembaga dari luar Indonesia,

JP-LPPH
V6, No
423-438

future trading
system of the
region
Samudera-
Pasai, is
believed to have
been
the
birthplace of
the
Rijksbank
of
the
Netherlands,
which is the
first
currency
unit.

Arifin



seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi di kawasan ASEAN lainnya.

Sejak awal reformasi Mei 1998 tuntutan penghapusan DOM di Aceh mulai menguat. Presiden Habibie mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan perang Aceh secara damai dan bermartabat. DOM akhirnya dicabut oleh menteri pertahanan dan keamanan / panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998.

Basyar (2008) menyatakan Habibie mencoba menyelesaikan masalah Aceh dengan pendekatan kesejahteraan dengan mengangkat menteri koordinator kesejahteraan rakyat sebagai koordinator tim independen. Kemudian Habibie memberi amnesti kepada 39 tahanan politik GAM, memberikan bantuan bagi anak yatim dan janda korban DOM, merehabilitasi bangunan di daerah bekas operasi militer, meningkatkan mutu pendidikan, memperpanjang landasan pacu bandara Iskandar Muda agar dapat berfungsi sebagai terminal emberkasi haji, membangun sabang sebagai pelabuhan bebas / terpadu, membangun kembali rel kereta api Banda Aceh - Besitang dan mengangkat 2,188 anak korban DOM menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa ujian.

Hamid (2006) menyebutkan setelah pemilu 7 Juni 1999 kekerasan di Aceh masih terus terjadi. Tuntutan referendum atau Aceh Merdeka semakin terasa gemanya di masyarakat. Tuntutan referendum atau Aceh Merdeka sebelum pemilu 1999 hanya disuarakan oleh mahasiswa dan GAM, tetapi setelah pemilu 1999 tuntutan ini telah didukung oleh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) yang mengadakan musyawarah di Banda Aceh pada tanggal 13-14 September 1999. HUDA menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum atau jajak pendapat di bawah pengawasan internasional.

Pada tanggal 6 Juli 1999 gubernor Syamsyuddin Mahmud menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat dan politisi lokal untuk membentuk pasukan perunding agar para pihak mahu maju ke meja perundingan. Dalam pertemuan ini disepakati untuk membentuk tiga pasukan perundingan. Pasukan pertama, untuk menemui Hasan Tiro di Swedia. Pasukan kedua, untuk bertemu panglima AGAM Tgk Abdullah Syafi'e di pedalaman Pidie. Pasukan ketiga, untuk bertemu presiden dan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Jakarta.

Pasukan pertama gagal bertemu dengan Hasan Tiro dan hanya berbicara dengan pimpinan GAM di Thailand dan Swedia. Sedangkan pasukan kedua dapat bertemu dengan Abdullah Syafi'e tetapi tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan GAM bergerak lebih agresif. Pada tanggal 29 September 1999 komandan GAM di Pase, Bate Iliak dan

Pidie mengeluarkan maklumat agar kantor-kantor pemerintah menghentikan kegiatannya mulai 1 Oktober 1999.

Akibatnya kegiatan di kantor pemerintah menjadi lumpuh kecuali unit militer, kesehatan, bekalan air dan listrik. Setelah dikeluarkan maklumat tersebut pekerja dari luar Aceh mulai pindah dari Aceh. Pada tanggal 8 November 1999 presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) menyatakan persetujuannya atas referendum untuk Aceh. Gusdur meminta agar masyarakat Aceh memahami kecemasan Jakarta belajar dari jajak pendapat di Timor Timur (Akhir Agustus 1999) yang menyebabkan Timor Timur merdeka.

Oleh sebab itu presiden Abdurrahman Wahid menolak sebuah referendum dilaksanakan secara terburu-buru. Ketika berada di Filipina 10 November 1999 presiden menyatakan bahwa referendum yang dimaksudkannya untuk Aceh terdiri dari tiga pilihan, yaitu otonomi luas, pembagian pendapatan 75% untuk Aceh dan 25% untuk pemerintah pusat dan otonomi khas (untuk provinsi) tidak ada opsi merdeka. Akhirnya usaha ketiga tim yang difasilitasi oleh gubernur Syamsyuddin Mahmud tidak membawa hasil yang diharapkan, yaitu agar para pihak bersedia maju ke meja perundingan dan meninggalkan aksi kekerasan.

Pada minggu ke tiga November 1999 MP-GAM telah menyatakan kesediaannya untuk maju ke meja perundingan untuk menghindari korban yang lebih banyak terhadap rakyat Aceh. Pernyataan MP-GAM dikecam keras oleh GAM pimpinan Hasan Tiro. Setelah itu isu perundingan damai muncul kembali sebagai salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan presiden Abdurrahman Wahid dengan 45 tokoh intelektual, ulama, santri dan LSM Aceh yang datang ke Jakarta.

Masalah internal antara GAM-RI kemudian harus dibawa ke meja perundingan internasional, karena keadaan konflik belum juga membaik meskipun DOM telah dicabut. Sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, Henry Dunant Centre (HDC) mencoba untuk menjadi mediator di Bavois, Swiss pada tanggal 12 Mei 2000. Perundingan itu kemudian menyetujui suatu Joint Understanding (Persetujuan Jeda Kemanusiaan).

3. Perundingan Pertama Dan Lahirnya Jeda Kemanusiaan

Sejak tahun 2000 pemerintah Indonesia di bawah presiden Abdurrahman Wahid mencoba melakukan pendekatan dialog damai dengan GAM. Pada tanggal 12 Mei 2000, kedua pihak yang berkonflik (pemerintah Indonesia dan GAM) melalui mediasi Henry Dunant Centre (HDC) menandatangani "Jeda Kemanusiaan" yang berlaku mulai 2 Jun 2000 hingga 15 Januari 2001. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dua komite bersama untuk upaya keamanan dan kemanusiaan dibentuk yang anggotanya diwakili secara

JP-LPPM
V6,N2
423-438

future trading
system of the
kingdom
Sumudera-
Pasai, is
believed to have
used
Abdurrahman of
gold coins,
which is the
first currency
used.
Muhammad Arifin

berimbang b
HDC sendiri
bertikai terseb
Seperti
ditandatangani
Aceh yang
Kedua belah
mampu men
secara militer
para pihak u
kemudian ko
terjadi.

Pada
tetap terjadi,
dalam dialog
September 2
tanggal 5 Jan
ini tindak
Sentral Inform
masyarakat A
(Sira-Rakan)
dan GAM me

Kesep
tingkat kekeras
saling meny
tindak kekeras
menginternasi
kemanusiaan t
Jalan Damai p
Namun
diharapkan. A
Abdurrahman
tentang langka
tersebut mem
Aceh. Pada
otonomi yang
tujuan mengur

4. Perundingan

Pada
menggantikan
kepemimpinan
menyelesaikan



berimbang baik dari GAM maupun dari Pemerintah Indonesia. Pihak HDC sendiri menjadi pihak penengah bagi kedua belah pihak yang bertikai tersebut.

Sepertimana yang disebutkan oleh Hamid (2006) bahwa ditandatanganinya jeda kemanusiaan disambut gembira oleh rakyat Aceh yang telah lama mendambakan suasana aman dan damai. Kedua belah pihak yang bertikai (Indonesia dan GAM) diharapkan mampu menahan diri untuk tidak mengedepankan penyelesaian secara militer. Pada awalnya jeda kemanusiaan ini mampu menahan para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun tidak lama kemudian kontak senjata antara TNI/ POLRI dan GAM kembali terjadi.

Pada masa ini kontak senjata antara TNI/ POLRI dan GAM tetap terjadi, tetapi sedikit berkurang. Basyar (2008) menyatakan dalam dialog antara pemerintah Indonesia dengan GAM tanggal 16 September 2000 disepakati jeda kemanusiaan tahap II sampai tanggal 5 Januari 2001. Namun pada masa jeda kemanusiaan tahap II ini tindak kekerasan kembali meningkat. Melihat keadaan tersebut Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) menggelar sidang umum masyarakat Aceh "Sidang Raya Rakyat Aceh Untuk Kedamaian" (Sira- Rakan). Kegiatan ini menyebabkan gerakan mahasiswa (SIRA) dan GAM menjadi sinergis.

Kesepakatan Jeda kemanusiaan tidak berhasil mengurangi tingkat kekerasan di lapangan. Kedua pihak baik militer maupun GAM saling menyalahkan dan menuduh pihak ketiga sebagai pelaku tindak kekerasan. Jeda kemanusiaan merupakan langkah maju dalam menginternasionalisasi konflik melalui penglibatan pihak HDC. Jeda kemanusiaan tersebut diganti namanya dengan Kesepakatan Dialog Jalan Damai pada Maret 2001.

Namun kesepakatan ini juga tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Akhirnya pada tanggal 11 April 2001 presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan intruksi presiden nomor 4/2001 tentang langkah menyeluruh untuk penyelesaian masalah Aceh. Intruksi tersebut membuka jalan bagi peningkatan kembali operasi militer di Aceh. Pada masa Abdurrahman Wahid pemerintah menawarkan otonomi yang lebih luas bagi Aceh dalam mengelola daerahnya dengan tujuan mengurangi dukungan bagi kemerdekaan Aceh.

4. Perundingan Kedua Dan Lahirnya Coha

Pada Juli 2001 presiden Megawati Soekarno Putri menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Di masa kepemimpinannya, Megawati mencoba jalan damai dalam menyelesaikan kasus Aceh dengan membuat kesepakatan penghentian

kekerasan Cessation On Hostilities Agreement, (COHA) yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 9 Desember 2002.

Sesuai dengan COHA GAM wajib menyerahkan seluruh persenjataannya dan meletakkannya di tempat tertentu, kemudian relokasi dan perumusan ulang peranan militer Indonesia di Aceh serta keputusan bersama untuk beberapa daerah damai. Hasil Pendekatan baru tersebut pun mengalami kegagalan. Akhirnya COHA tidak dapat menghentikan pemberontakan di Aceh, kemudian presiden Megawati mengumumkan status Darurat Militer di Aceh melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 2003.

Tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk pemulihan keamanan, penegakan hukum dan menjalankan roda perekonomian di Aceh. Akan tetapi kebijakan ini dimanfaatkan oleh pihak tentera dan polis untuk mengurangi aktiviti GAM di Aceh dan mendirikan pemerintahan darurat di daerah yang sebelumnya dikuasai oleh GAM.

Sebelum status darurat diberlakukan hampir 80% pemerintah lokal di Aceh tidak dapat melaksanakan tugasnya. Status tersebut berlanjut hingga status Darurat Sipil yang berlangsung hingga enam bulan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono 2004.

5. Tsunami Dan Lahirnya Perjanjian Damai Helsinki

Bencana gempa tsunami telah menjadikan Aceh terintegrasi ke dunia luar karena level bencananya yang mendunia. Pengintegrasian itu wujud dalam bentuk keterlibatan berbagai organisasi internasional dan regional dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh. Pemerintah Indonesia tidak mampu menanggulangi intervensi kemanusiaan pihak internasional. Baik yang dilakukan berbagai kumpulan masyarakat sipil, maupun kekuatan militer internasional. Pemerintah Indonesia memang tidak sanggup membangun kembali Aceh masa itu dengan menggunakan anggaran negara yang ada.

Pada awalnya pihak internasional hanya fokus pada masalah pembangunan masa darurat dan pasca bencana. Namun kemudian mereka harus masuk ke penyelesaian peperangan di Aceh melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga supaya agenda rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dapat dilaksanakan. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara sukses di daerah konflik. Oleh sebab itu perdamaian menjadi persyaratan politik utama bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Jika para pihak yang terlibat dalam konflik ingin tetap menjadi warga dunia yang tidak terasing dari penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan, maka harus membuka kembali dialog untuk perdamaian. Gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 membuka pintu rahmat bagi masyarakat Aceh.

JP-LPPM
V6,N2
423-438

Future trading system of the Kingdom Samudera-Pasai, is believed to have used aureuham of gold coins, which is the first currency of Aceh.

Hadri Arifin

Harap mengisyitihark meningkatnya langsung telah daerah damai memberi peng bersenjata di A Seperti negara yang m tsunami meng Ini bermakna dilakukan dalam ke meja peru Bambang Yuc konflik Aceh.

Tsunami mungkin lagi r ke Aceh dalam serta badan-ba bekerja dalam perhatian diara tsunami, namu kepada semua p

Tsunami masyarakat Ac masyarakat inte akan membuat datang. Secara keseimbangan pendek terutar posisi masih sa ini harus mele ini. Dalam isu posisi Indonesia Indonesia tetap kemerdekaanny

Pihak korban keman bahwa kekeras Ertinya nilai ter untuk menjala selamat dari tuntutan kemer petanda adanya



Harapan damai yang hampir hilang begitu pemerintah mengisytiharkan Aceh daerah perang kembali muncul seiring dengan meningkatnya perhatian luar ke Aceh. Tsunami secara langsung dan tidak langsung telah mentransformasi Aceh dari daerah perang menjadi daerah damai. Terbukanya Aceh bagi masyarakat internasional banyak memberi pengaruh pada kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik bersenjata di Aceh.

Sepertimana yang disebutkan oleh Hasanuddin (2007) negara-negara yang memiliki komitmen untuk membantu Aceh pasca bencana tsunami mengharapkan agar kondisi keamanan di Aceh dapat terwujud. Ini bermakna pemerintah Indonesia harus merubah pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan di Aceh, dari cara-cara militer ke meja perundingan. Persyaratan ini memaksa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan cara damai untuk mengakhiri konflik Aceh.

Tsunami yang begitu dahsyat membuat pemerintah Indonesia tak mungkin lagi menutup Aceh dari dunia luar. Ribuan tentera asing masuk ke Aceh dalam masa darurat tiga bulan pertama tsunami dan ratusan NGO serta badan-badan internasional lainnya sampai Desember 2009 terus bekerja dalam berbagai program rekonstruksi. Meskipun kebanyakan perhatian diarahkan kepada bantuan kemanusiaan dan recovery akibat tsunami, namun kenyataan konflik yang ada akan menjadi pertimbangan kepada semua pihak yang ingin menyalurkan bantuannya di Aceh.

Tsunami memang telah membuat kapasitas sosial ekonomi masyarakat Aceh mengalami kemunduran yang besar, namun dukungan masyarakat internasional berikut transfer ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kapasitas orang Aceh lebih baik pada masa yang akan datang. Secara jangka panjang akan ada perubahan yang penting dalam keseimbangan hubungan Aceh dan Indonesia. Namun dalam jangka pendek terutama dalam proses perundingan yang sedang berlangsung posisi masih sangat asimetris. Lemahnya posisi GAM, membuat gerakan ini harus melepaskan tuntutan kemerdekaannya dalam perundingan kali ini. Dalam isu kemerdekaan ini, dunia internasional juga berada dalam posisi Indonesia, sehingga GAM tidak punya banyak pilihan. Pemerintah Indonesia tetap berpendirian bahwa GAM mesti melepaskan tuntutan kemerdekaannya sebagai syarat pembicaraan damai.

Pihak tentera Indonesia sama sekali tidak memperhitungkan korban kemanusiaan akibat tsunami, mereka tetap berprinsip sama bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Artinya nilai teritori lebih penting daripada mempermudah berbagai pihak untuk menjalankan misi kemanusiaan menolong orang-orang yang selamat dari tsunami. Di pihak GAM, sikapnya untuk melepaskan tuntutan kemerdekaan demi dimulainya pembicaraan damai merupakan petanda adanya kesadaran untuk menghentikan kekerasan di Aceh.

Bahkan syarat yang lunak seperti pembebasan juru runding yang dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia juga tidak diajukan ketika GAM masuk dalam perundingan. Berbagai pernyataan pimpinan GAM juga menunjukkan kemauan yang besar untuk membuka jalan kepada negara luar untuk membantu rakyat Aceh akibat tsunami.

Sinyal perdamaian Aceh semakin terang terlihat. Berbagai kegagalan dalam perundingan sebelumnya, seakan memberikan pelajaran bahwa sebenarnya masalah Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai, tanpa harus mengorbankan banyak hal untuk suatu perdamaian. Karena dengan pengalaman HDC, pihak yang bersengketa setidaknya dapat berdialog mengenai segala kemungkinan yang akan terjadi dan hal ini mungkin saja akan terealisasi pada suatu perundingan yang lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa tua ini.

Setelah melakukan pertemuan sebanyak lima kali yang bermula sejak pertengahan Januari 2005 akhirnya kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM berhasil ditandatangani yaitu pada tanggal 25 Agustus 2005 di Helsinki, yang kemudian lebih dikenal dengan Memorandum of Understanding atau MoU Helsinki. Dengan demikian kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai dan bermartabat. Penyelesaian damai atas konflik Aceh akan membantu pembangunan kembali Aceh pasca bencana.

Apabila perdamaian wujud tsunami politik (perang) yang telah melanda Aceh selama 30 tahun berakhir. Mungkin sebagian orang menganggap tsunami itu musibah, namun dibalik musibah tsunami ada rahmat yang sangat besar yaitu lahirnya perdamaian. Sebahagian masyarakat Aceh setelah tsunami banyak yang bekerja di NGO nasional dan internasional di Banda Aceh. Mulai dari supir, penerjemah, kerani, meneger, pembekal, kontraktor hingga tukang bangunan. Jika hal ini dilihat daripada sudut pandangan ekonomi ini akan memberi kesan yang sangat positif untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang sempat terganggu selama perang berlangsung. Di bidang pendidikan pula, apabila perdamaian wujud proses pembelajaran di semua sekolah sudah dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasanuddin (2007) menyebutkan perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia merangkumi enam poin besar. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang termasuk di dalamnya undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, partisipasi politik, ekonomi, dan peraturan perundang-undangan. Kedua, Hak Azasi Manusia (HAM). Ketiga, amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Keempat, pengaturan keamanan. Kelima, pembentukan misi monitoring Aceh. Keenam, penyelesaian perselisihan. Dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) tersebut di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh pihak GAM dan RI



maka setelah itu lahir undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang juga dikenal dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Nota kesefahaman damai pemerintah dengan GAM menetapkan bahwa sejak ditandatanganinya naskah tersebut Tentera Nasional Indonesia (TNI) harus menarik pasukan bantuan (non organik) di Aceh. GAM pula harus menyerahkan senjata dalam waktu tiga setengah bulan. Senjata standard yang dimiliki oleh GAM saat itu diperkirakan 849 senjata. Lokasi dan mekanisme penyerahan senjata dan penghancuran sepenuhnya ditentukan oleh Aceh Monitoring Mission (AMM).

AMM adalah pihak ketiga yang memantau dan mencatat jika ada yang salah dan mengoreksi kembali langkah-langkah yang diambil agar kembali ke jalur MoU. Keberadaan AMM di Aceh pada awal perdamaian telah diatur dalam MoU Helsinki. Tim ini dipimpin oleh Piter Feith dari sekretaris dewan Uni Eropa dan wakil ketua utama Letjen Thinglek dari Thailand, tim ini memiliki wewenang dan hak-hak tertentu dalam mengamankan kesepakatan yang telah disepakati ketika diterapkan di lapangan, seperti memantau agar ditaatinya gencatan senjata, memantau penyerahan diri, pelucutan senjata GAM dan memantau penarikan pasukan non organik dari Aceh.

Perjanjian damai di Aceh kini telah terwujud, sanggupkah para pihak yang pernah berperang merawat dan menjaga perdamaian yang telah mereka tandatangani itu. Supaya perdamaian di Aceh dapat berlangsung untuk selamanya. Kamaruzzaman Askandar dalam Otto (2008) menyebutkan perdamaian adalah satu proses. Ia bukan hanya merupakan matlamat akhir yang ingin dicapai tetapi juga merupakan peta perjalanan yang memberikan tunjuk arah kepada perjalanan ini. Berjaya atau tidak usaha mencapai matlamat akhir, akan bergantung kepada bagaimana peta dilukiskan dan perjalanan itu dilalui.

Kita menyedari untuk mencapai perdamaian yang hakiki memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, perkembangan Aceh sekarang adalah tahapan tradisional dari perang menuju ke alaf baru. Aceh kini bukan lagi tempat latihan perang bagi tentera Indonesia dan juga bukan arena konflik bersenjata di Nusantara melainkan sudah menjadi laboratorium yang mengajarkan erti demokrasi sebenarnya bagi Indonesia.

7. KESIMPULAN

Berbagai pendekatan telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Aceh. Di antaranya pemberlakuan darurat militer, darurat sipil, operasi jaring merah hingga jeda kemanusiaan dan COHA. Namun kekerasan di Aceh tetap saja meningkat hingga gempa bumi dan tsunami melanda Aceh. Gempa bumi dan tsunami

di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah membuka pintu rahmat bagi masyarakat Aceh.

Tsunami secara langsung atau tidak langsung telah merubah keadaan perang di Aceh menjadi damai. Kedua belah pihak yang berperang telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara damai melalui jalan dialog. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2005 ditandatangani kesepakatan damai di Helsinki Finlandia atau yang lebih populer dengan sebutan MoU Helsinki. Perdamaian Aceh telah melewati jalan yang sangat berliku dan ia menjadi peristiwa bersejarah dalam kehidupan bangsa di Indoensia.

Semua masyarakat berharap damai yang ada dapat dijaga dan dipelihara untuk selamanya. Sehingga pendidikan di Aceh yang sempat terganggu selama puluhan tahun akibat perang dapat bangkit dan berjaya kembali. Kerugian terbesar yang dialami Aceh selama berlansungnya peperangan adalah hancurnya peradaban Aceh. Dengan adanya perdamaian rakyat Aceh harus bangkit untuk membangun kembali Aceh.

JP-LPPM
V6_N2
423-438

Bibliografi

- Abdullah Gani Nurdin, et al. 1999. *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Abdullah Sani Usman. 2010. *Krisis Legitimasi Politik di Indonesia, Kes Aceh*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Abu Jihad. 2000. *Pemikiran-pemikiran Politik Hasan Tiro Dalam Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Titian Ilmu Insani.
- Al Chaidar. 1998. *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Alkausar.
- Alfian. 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Aspinall, Edwar. 2009. *Islam and Nation, Separatis Rebellion in Aceh, Indonesia*. Singapore: NUS.
- Basyar, M. Hamdan et.al. 2008. *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi* Jakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI.



- Bhakti, Ikrar Nusa. 2008. *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, P2P-LIPI
- Chamil Warija. 1989. *Pergolakan Antara Bangsa, Perkembangan dan Isu Utama Sejak 1945*. Kuala Lumpur: AMK Interaksi Sdn. Bhd.
- Daud Baharum. 1982. *Perang Dunia Kedua dan Asia*. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.
- Hamid, Ahmad Farhan. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas.
- Hasanuddin, Yusuf Adan. 2007. *UUPA dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Hasanuddin, Yusuf Adan. 2006. *Politik dan Tamaddun Aceh*. Banda Aceh: Adnin Foundation.
- Otto Syamsyuddin Ishak. 2008. *Perdamaian yang Berikhtiar, yang Menentang: Kronik Perundingan GAM – RI di Helsinki 2005*. Banda Aceh: ACSTF.

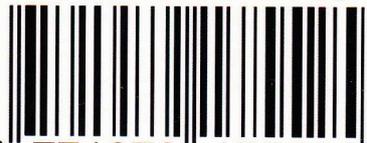


Pasai

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

Diterbitkan oleh:
Lembaga Penelitian & Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Malikussaleh
Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 26, Lancang Garam
Lhokseumawe 24351
Nanggroe Aceh Darussalam
Indonesia

ISSN 1979-1755



9 771979 175525